

PROPAGANDA DAN KOMUNIKASI MASSA

A. Propaganda Sebagai Kegiatan Komunikasi.

Propaganda adalah suatu penyebaran pesan yang terlebih dahulu telah direncanakan secara seksama untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat dan tingkah laku dari penerima/komunikasikan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh komunikator (Santosa Sastropoetro, *Propaganda: Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa*, Bandung: Alumni, 1991, h. 34). Propaganda merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikasikan dengan tujuan khusus, yaitu perubahan pada diri komunikasikan sesuai dengan kehendak komunikator secara persuasif. Teknik-teknik yang biasa digunakan secara persuasif dalam kegiatan propaganda adalah sebagai berikut: *Name Calling; Glittering Generality; Transfer; Testimoni; Plain Folks; Card Staking; Bandwagon*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa propaganda merupakan salah satu kegiatan komunikasi.

B. Propaganda Sebagai Kegiatan Komunikasi Massa.

Mengingat bahwa setiap tindakan komunikasi senantiasa mengandung kepentingan, apalagi komunikasi melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi, maka dapatlah jika dikatakan bahwa sering kali tindakan komunikasi massa (berita, opini, iklan) adalah suatu propaganda.

Menurut pandangan *communication as discourse*, komunikasi dilakukan dalam rangka menciptakan "kenyataan lain" atau "kenyataan kedua" dalam bentuk wacana (*discourse*) dari "kenyataan yang pertama". Cara yang ditempuh dalam pembentukan wacana ("kenyataan kedua") itu adalah sebuah proses yang disebut konstruksi kenyataan (*realitas*).

Berdasarkan sebuah penelitian (Ibnu Hamad, *Konstruksi realitas Politik di Media Massa sebuah Study Critical Discourse Analysis*, Jakarta: Granit, 2004), proses konstruksi realitas oleh pelaku (2) dalam media massa dimulai dengan adanya realitas pertama berupa keadaan, benda, pikiran, orang, peristiwa, dan sebagainya (1). Secara umum, sistem komunikasi adalah faktor yang mempengaruhi sang pelaku dalam membuat wacana. Dalam sistem komunikasi libertarian, wacana yang terbentuk akan berbeda dalam sistem komunikasi yang otoritarian. Secara lebih khusus, dinamika internal dan eksternal (4) yang mengenai diri si pelaku konstruksi tentu saja sangat mempengaruhi proses konstruksi. Ini juga menunjukkan bahwa pembentukan wacana tidak berada dalam ruang vakum. Pengaruh itu bisa datang dari pribadi si pembuat dalam bentuk kepentingan idealis, ideologis, dan sebagainya maupun dari kepentingan eksternal dari khalayak sasaran sebagai pasar, sponsor dan sebagainya (5).

Gambar Proses Konstruksi Realitas dalam Pembentuk Discourse

Internal dan Eksternal Pelaku Konstruksi (4)

Sistem Komunikasi yang Berlaku

(3)

Strategi Mengkonstruksi Realitas (6)

Proses Konstruksi
Realitas oleh
Pelaku

(2)

Fungsi Bahasa

Strategi Framing

Strategi Priming (7)

Faktor Internal :

Ideologis, Idealis...

Faktor Eksternal:

Pasar, Sponsor... (5)

Discourse atau

Realitas yang Dikonstruksian

(Text, Talk, Act dan Artifact) (8)

Makna, Citra, dan Kepentingan di Balik Wacana (9)

Untuk melakukan konstruksi realitas, pelaku konstruksi memakai suatu strategi tertentu (6). Tidak terlepas dari pengaruh eksternal dan internal, strategi konstruksi ini mencakup pilihan bahasa mulai dari kata hingga paragraf; pilihan fakta yang akan

dimasukkan/dikeluarkan dari wacana yang populer disebut strategi framing, dan pilihan teknik menampilkan wacana di depan publik atau strategi priming (7). Selanjutnya, hasil dari proses ini adalah wacana (*discourse*) atau realitas yang dikonstruksian (8) berupa tulisan (*text*), ucapan (*talk*), tindakan (*act*) atau peninggalan (*artifact*). Oleh karena *discourse* yang terbentuk ini telah dipengaruhi oleh berbagai faktor, kita dapat mengatakan bahwa di balik wacana itu terdapat makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan (9).

Dalam kenyataan, wujud dari bentuk wacana itu dapat dilihat dalam beragam buah karya si pembuat wacana:

- *Text* (wacana dalam wujud tulisan/garfis) antara lain dalam wujud berita, features, artikel opini, cerpen, novel, dsb.
- *Talk* (wacana dalam wujud ucapan), antara lain dalam wujud rekaman wawancara, obrolan, pidato, dsb.
- *Act* (wacana dalam wujud tindakan) antara lain dalam wujud lakon drama, tarian, film, defile, demonstrasi, dsb.
- *Artifact* (wacana dalam wujud jejak) antara lain dalam wujud bangunan, lanskap, fashion, puing, dsb.

Keberadaan bermacam bentuk wacana dapat kita temukan dalam media cetak (seperti novel), media audio (seperti pidato), media visual (seperti lukisan), media audiovisual (seperti film), di alam (seperti lanskap dan bangunan), atau *discourse/Discourse* yang dimediasikan (seperti drama yang difilmkan). Jadi tak selamanya *discourse/Discourse* itu berada dalam bentuk media massa, apalagi hanya media cetak.

Soal Latihan:

1. Jelaskan hubungan propaganda dengan komunikasi massa!
2. Bagaimana kegiatan propaganda terdapat pada komunikasi massa? Sebutkan beberapa contohnya!
3. Sebutkan beberapa media propaganda, dan jelaskan efektivitas media tersebut sehubungan dengan khalayak yang dituju!

Secara kontekstual komunikasi dapat dikategorikan sebagai berikut: a. Komunikasi intrapribadi, yaitu proses penyampaian pesan pada diri peserta komunikasi. Teori-teori komunikasi intrapribadi, umumnya membahas mengenai proses pemahaman, ingatan, dan interpretasi terhadap simbol-simbol yang ditangkap melalui pancaindera; b. Komunikasi antarpribadi, yaitu proses penyampaian pesan diantara dua peserta komunikasi. Teori-teori komunikasi antarpribadi, umumnya memfokuskan pengamatannya pada bentuk-bentuk dan sifat hubungan (*relationships*), percakapan (*discourse*), interaksi, dan karakteristik komunikator; c. Komunikasi kelompok, yaitu proses penyampaian pesan diantara anggota-anggota kelompok. Teori-teori komunikasi kelompok, membahas tentang dinamika kelompok, efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola dan bentuk interaksi,

serta pembuatan keputusan; d. Komunikasi organisasi, yaitu proses penyampaian pesan diantara anggota-anggota organisasi. Teori-teori komunikasi organisasi, membahas antara lain struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta kebudayaan organisasi; e. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan-pesan melalui surat kabar, majalah, tabloid, radio, televisi yang ditujukan kepada sejumlah orang banyak, heterogen, anonim.

Diposting oleh ADI PRAKOSA di [20:31](#) [0 komentar](#) 

Senin, 2008 April 07

SALURAN KOMUNIKASI POLITIK (KP 6)

A. Ragam Saluran Komunikasi Politik.

Beberapa bentuk saluran komunikasi politik yang akan diungkapkan disini, dalam fungsi yang berbeda memang telah dikemukakan sebelumnya yakni sebagai komunikator dalam komunikasi politik, oleh karena beberapa unsur tertentu yang dimaksudkan ternyata memang bisa berfungsi ganda. Ia dapat berfungsi sebagai sumber/komunikator di satu saat, tetapi pada waktu tertentu lebih berfungsi sebagai saluran atau media, dan pada waktu yang lain berfungsi sebagai keduanya.

Kegandaan fungsi itu bukanlah sesuatu yang aneh karena suatu pihak dalam berlangsungnya proses komunikasi memang tergantung dari mana kita akan meninjaunya. Birokrasi (pemerintah) misalnya, di satu pihak merupakan komunikator yang menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari pemerintah, namun dalam kesempatan lain ia juga dapat berfungsi sebagai saluran bagi lewatnya informasi yang berasal dari khalayak masyarakat. Fungsi yang ganda itu terutama ditemui pada unsur-unsur yang bersifat organisasional/institusional seperti pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa. Dengan begitu memang kelihatan bahwa dalam prakteknya dapat saja terjadi saling tukar tempat antar unsur-unsur komunikasi tersebut. Pengertian saluran komunikasi politik di dalam pembahasan ini memang luas cakupannya. Segala sesuatu pihak atau unsur yang

memungkinkan sampainya pesan-pesan politik termasuk ke dalam saluran komunikasi politik. Bahkan yang diistilahkan Almond dan Powell (dalam Nasution, 1990) sebagai struktur-struktur komunikasi pun, sebenarnya dimaksudkan sebagai saluran-saluran komunikasi politik. Struktur-struktur komunikasi politik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Struktur wawanmuka informal. Struktur ini merupakan saluran yang efektif dalam penyampaian pesan-pesan politik. Seterusnya, seperti yang ditemukan pada sistem organisasi manapun, ternyata disamping struktur yang formal dari suatu organisasi/sistem, senantiasa terdapat pula struktur informal yang membayangnya. Saluran ini memang bersifat bebas dalam arti tidak terikat oleh struktur yang formal, namun tidak semua orang dapat akses ke saluran ini dalam kadar yang sama. Mereka yang bisa akses ke saluran informal ini biasanya akan memperoleh lebih banyak informasi ketimbang yang tidak akses, meskipun hal ini masih ditentukan oleh beberapa factor lain.
2. Struktur sosial tradisional. Struktur ini merupakan saluran komunikasi yang memiliki keampuhan-keampuhan tersendiri, karena pada masyarakat yang bersangkutan memang arus komunikasi ditentukan oleh posisi sosial pihak yang berkomunikasi (khalayak maupun sumber). Artinya, pada lapis yang mana yang bersangkutan berkedudukan dan (tentunya akan menentukan pula) akses di susunan sosial masyarakat tersebut. Dalam masyarakat tradisional, susunan struktur sosial yang ada menentukan siapa yang layak berkomunikasi dengan siapa, tentang masalah apa, dan dengan cara apa. Dengan kata lain, struktur sosial tradisional pada hakekatnya mempunyai aturan-aturan yang menentukan baik pola maupun arus komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat tersebut. Bahkan jika diamati lebih jauh, dalam

masyarakat yang masih tradisional, sampai-sampai peran komunikasi seseorang (apakah sebagai komunikator, atau cuma penyampai/saluran, atau hanya berhak menjadi penerima saja) seakan-akan telah ditentukan menurut ketentuan yang berlaku di lingkungan tempat tersebut. Sekalipun harus diakui bahwa penetapan peran tersebut tidak bersifat mutlak, namun karena sifat kehidupan di masyarakat tradisional yang serba preskriptif, maka seolah-olah seorang individu tidak lagi bebas untuk menentukan sendiri peran komunikasi yang diinginkan (atau diperlukan), melainkan harus disesuaikan dengan posisi sosial si individu yang bersangkutan. Secara tidak sadar, sebenarnya sejak masa masyarakat tradisional dulu telah diakui betapa informasi atau lebih luas lagi komunikasi, merupakan sesuatu yang amat dekat dengan kekuasaan. Pye (1963) menggambarkan karakteristik yang mencolok dari proses komunikasi pada masyarakat tradisional, sebagai berikut;

- a. Tidak terorganisir sebagai suatu sistem yang jelas terbedakan dari proses-proses sosial yang lainnya.
- b. Mereka berpartisipasi dalam proses komunikasi tersebut, melakukan atas dasar posisi sosial atau politik yang diduduki oleh yang bersangkutan dalam masyarakatnya, dan sepenuhnya menurut ikatan pribadi mereka.
- c. Informasi biasanya mengalir mengikuti garis hirarkhi sosial atau menurut pola yang telah tertentu berdasarkan hubungan sosial pada tiap komunitas.
- d. Proses komunikasi tersebut tidak independen dari aturan hubungan sosial, ataupun isi komunikasi yang disampaikan. Penyebabnya adalah karena proses komunikasi yang dimaksud umumnya erat berkaitan dengan struktur dasar masyarakat tradisional, maka tindakan mengevaluasi, menginterpretasikan, dan memberi respon terhadap segala aktivitas komunikasi umumnya diwarnai

oleh pertimbangan-pertimbangan yang langsung berhubungan dengan hirarkhi status antara komunikator dan khalayak.

3. Struktur masukan (*input*) politik. Yang dimaksud dengan struktur masukan adalah struktur yang memungkinkan terbentuknya/dihasilkannya input bagi sistem politik yang dimaksud. Struktur-struktur input politik seperti serikat sekerja, kelompok-kelompok kepentingan, dan partai politik, merupakan saluran informasi yang bermakna dalam komunikasi politik. Merupakan sifat paling dasar bagi organisasi-organisasi yang disebut tadi, untuk melakukan transmisi kepentingan, baik yang umum (popular) dan yang khusus, ke arah yang digariskan oleh kepemimpinan politik yang berkuasa. Kehadiran struktur-struktur yang dimaksud ini, menurut mereka –setidak-tidaknya pada sistem yang membolehkan mereka bebas dari kontrol pemerintah- merupakan kesempatan bagi warga negara biasa untuk mempunyai sejumlah besar saluran untuk akses ke elit politik. Dengan akses ke salah satu struktur itu, dan kebebasan untuk membentuk yang baru, bila diperlukan , maka warga negara dengan mudah dapat menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka.
4. Struktur keluaran (*output*) politik. Adalah struktur formal dari pemerintahan. Struktur pemerintahan, khususnya birokrasi, memungkinkan pemimpin-pemimpin politik mengkomunikasikan petunjuk bagi pelaksanaan peraturan-peraturan untuk bermacam pemegang jabatan politik dengan cara yang efisien dan jelas. Efisien, karena jalur pemerintahan tentunya dengan dukungan kewenangan dan wibawa yang dimilikinya dapat dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan secara cepat dan mudah. Jalur birokrasi juga memungkinkan penyampaian pesan-pesan secara jelas karena, terutama karena mereka yang berada dalam jajaran birokrasi secara otomatis telah memiliki bahasa yang kurang lebih sama, yang memungkinkan pengertian-pengertian

menjadi lebih jelas di antara sesama mereka, ketimbang orang-orang yang berada di luar jalur tersebut. Struktur ini juga berperan penting dalam mensuplai informasi dalam jumlah besar kepada publik. Bahkan bukan hanya informasi yang menyangkut aturan resmi seperti peraturan-peraturan, melainkan juga release berita yang dikeluarkan pemerintah, yang nyatanya merupakan sumber informasi penting bagi media massa di banyak masyarakat.

5. Media massa. Saluran media massa, sudah barang tentu, sesuai dengan fungsi aslinya merupakan saluran penting dalam komunikasi politik. Namun dalam membicarakan saluran media massa dalam rangka komunikasi politik, selalu dikaitkan dengan konsep-konsep mengenai:

- a. kebebasan media massa.
- b. Independensi media massa pada suatu masyarakat dari *control* yang berasal dari luar dirinya, seperti pemerintah, pemegang saham, kaum kapitalis/industrialis, partai politik, ataupun kelompok penekan.
- c. Integritas media massa sendiri pada misi yang diembannya.

Ketiga hal tersebut memang membawa konsekuensi yang berbeda dalam pelaksanaan peran media massa sebagai saluran komunikasi politik, sesuai dengan kondisi yang dipunyai oleh masing-masing masyarakat tempat media massa itu berada. Terlepas dari ketiga hal di atas, secara umum media massa mempunyai peranan tertentu dalam menyalurkan pesan-pesan, informasi, dan *political content* di tengah masyarakatnya.

Saluran-saluran lain yang juga berperan dalam penyampaian pesan-pesan politik, diantaranya *lobbying*, media tradisional, demonstrasi, kesenian dan kebudayaan, sastra, media-media khusus seperti telepon, koran dinding, spanduk, brosur, leaflet, rapat umum, gossip, rumor.

Menurut Nasution (1988), yang membedakan suatu sistem politik modern dengan sistem politik tradisional ialah, adanya kebutuhan akan interaksi yang konstan antara lembaga-lembaga politik dengan para pemimpin di satu pihak, dan dengan komponen-komponen sosial yang luas di pihak lain. Perbedaan ini menunjukkan betapa pentingnya saluran-saluran komunikasi dalam perkembangan suatu sistem politik modern. Galnoor (dalam Nasution, 1990) menghubungkan peranan saluran ini dengan kebutuhan suatu sistem politik akan dukungan politik yang hanya bisa diperoleh jika jaringan komunikasi berhasil menembus hingga kebagian-bagian masyarakat yang relevan dengan politik. Ia mengartikan penerobosan (penetrasi) saluran tersebut sebagai suatu kemampuan untuk melintasi atau menembus batas-batas geografis dan sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat. Karena itu pula, atribut-atribut yang biasanya bersifat unik untuk tiap-tiap masyarakat akan menentukan jenis saluran penerobos yang mana dipakai untuk menembus bagian-bagian tertentu masyarakat yang dimaksud. Mao dan Gandhi misalnya, disebut telah menggunakan saluran kepemimpinan garis massa untuk dapat menjangkau seluruh bangsa Cina dan India yang tersebar luas itu.

B. Saluran Media Massa dalam Komunikasi Politik.

Dengan suatu sistem komunikasi yang otonom, maka komunikasi yang bersifat tertutup (covert) pada birokrasi, kelompok-kelompok kepentingan, dan partai politik, sampai tingkat tertentu dapat diatur dan dikendalikan dengan publisitas. Pada saat yang sama, kepentingan-kepentingan yang laten (tidak dinyatakan secara terang-terangan) di tengah masyarakat dapat dibuat menjadi ekspilisit melalui media komunikasi yang netral.

Otonomi media komunikasi memungkinkan suatu arus informasi yang bebas dari masyarakat ke pemerintahan, dan di dalam pemerintahan sendiri, serta dari suatu struktur politik ke

struktur politik yang lain. Hal itu juga memungkinkan adanya suatu umpan balik yang terbuka dari output sistem politik ke input sistem politik kembali.

Pada sebagian masyarakat transisional para pemimpin politik memandang pembangunan media massa modern sebagai sesuatu kekuatan untuk menegakkan persatuan nasional, sekaligus sebagai daya untuk mengerakkan modernisasi. Dengan menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi dalam hal bahasa, perbedaan tingkat pengetahuan, kepercayaan, dan kebiasaan, maka perluasan komunikasi berfungsi sebagai jembatan bagi sistem-sistem yang tadinya dicirikan oleh arus komunikasi yang amat heterogen.

Masalah membangun identitas nasional memang merupakan suatu persoalan yang kompleks. Disamping kekuatan positif media massa nasional, pengembangan suatu kultur politik yang stabil dan homogen akan tergantung dalam banyak hal kepada arah yang dikembangkan oleh struktur komunikasi yang ikut serta dari kalangan partai, kelompok kepentingan, dan para pemimpin opini, yang berhubungan dengan warga masyarakat secara lebih langsung.

Sebagian informasi, khususnya yang disampaikan oleh media massa akan melintasi garis-garis batas geografis dan kelas sosial. Namun dua karakteristik perubahan *attitude* akan membatasi dampak media tersebut. *Yang pertama* adalah interpretasi informasi melalui media massa tentunya akan dilakukan oleh para pemimpin opini. Pemimpin opini itu sendiri akan amat dipengaruhi oleh hubungan antar personanya (jaringan sosialnya), yang menurut penelitian selama ini menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa pengaruhnya lebih kuat dalam hal persuasi ketimbang media massa.

Yang kedua, sekalipun secara persis masih diperdebatkan, tapi dalam banyak hal media massa diakui sebagai saluran yang berkemampuan untuk menyampaikan lebih dari sekedar

informasi politik. Artinya, media massa dapat dibuktikan mempunyai efek politik dalam suatu kelangsungan sistem politik suatu masyarakat. Kekuatan media, dalam kaitan ini, menurut Gurevitch dan Blumler (dalam Nasution, 1990) bersumber dalam tiga hal, yaitu struktural, psikologis, dan bersifat normatif. Akar struktural kekuatan media massa bersumber pada kemampuannya yang unik untuk menyediakan khalayak bagi para politisi yang ukuran dan komposisinya tidak akan diperoleh para politisi dimaksud melalui alat yang lain. Sedangkan akar psikologis dari kekuatan media bersumber pada hubungan kepercayaan dan keyakinan yang berhasil diperoleh (meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda) oleh organisasi media dari anggota khalayaknya masing-masing. Ikatan saling percaya ini tumbuh berdasarkan pada pemenuhan harapan khalayak selama ini dan validasi dari hubungan percaya mempercayai di masa lampau antara media yang bersangkutan dengan khalayaknya. Kombinasi antara akar struktural dan akar psikologis tadi memungkinkan media mendudukkan diri di tengah-tengah –antara politisi dan khalayak- dan sekaligus mencampuri proses politik yang berlangsung. Campur tangan tersebut mungkin saja tidak disukai oleh banyak pihak termasuk kalangan politik dimaksud. Di sini kemudian, tampillah sifat normatif media yang bersumber pada prinsip-prinsip demokrasi mengenai kebebasan menyatakan pendapat, kebutuhan akan perlindungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan kekuatan politik, yang memberi legitimasi kepada peran independensi media dari kendali politik (baca handsout komunikasi massa: teori-teori normatif komunikasi massa).

Media massa dianggap memiliki peranan yang unik dalam pembangunan politik, karena memiliki suatu instrumen teknologi yang independen, yang produknya dapat menjangkau ke tengah-tengah masyarakat dalam jumlah yang besar (Gerbner dalam McQail, 1987). Di samping itu, media massa menganggap diri sebagai perantara yang independen antara pemerintah dengan publik.

C. Pemanfaatan Saluran-Saluran Komunikasi Politik

Berfungsinya saluran-saluran komunikasi politik dalam suatu sistem politik tergantung pula bagaimana pemanfaatan saluran-saluran tersebut oleh masyarakat, dan apakah masyarakat dapat akses sepenuhnya ke saluran-saluran tersebut. Galnoor (dalam Nasution, 1990) menekankan masalah pemanfaatan saluran ini karena menurut pendapatnya mobilitas politik dan masalah akses ke jaringan komunikasi merupakan prasyarat bagi tumbuhnya partisipasi politik. Ia mengartikan partisipasi politik sebagai aktivitas pribadi warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengemudian yang aktual dari sistem politik yang bersangkutan.

Suatu partisipasi politik dalam kaitannya dengan komunikasi politik, menurut Galnoor (dalam Nasution, 1990), mencakup hal-hal berikut:

1. Kemampuan memprakarsai suatu pesan informasi oleh para individu yang menginginkan sesuatu dari sistem politik, atau memberikan respon terhadap sesuatu yang akan atau telah dilaksanakan. Dengan perkataan lain, suatu usaha untuk menggunakan jaringan komunikasi dan saluran-salurannya untuk tujuan yang disebut di atas.
2. Pemanfaatan secara otonom jaringan komunikasi politik yang ada, dalam pengertian bukan sekedar hasil mobilisasi dari atas.
3. Upaya informasional yang bukan sekedar suatu praktek berkomunikasi, tetapi benar-benar sebagai suatu upaya untuk memperoleh dampak –yakni menyampaikan pesan-pesan kekuasaan untuk mempengaruhi kemudi sistem politik yang bersangkutan.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa pemanfaatan saluran komunikasi politik tersebut berhubungan dengan dua tahap perkembangan politik yang demokratis, yaitu:

- a. Partisipasi responsif, dimana anggota masyarakat memberikan suara, menyampaikan keluhan, kepada para pejabat, dan barangkali mengidentifikasi diri mereka melalui tanda-tanda identitas tertentu. Namun dalam tahap ini, konsepsi masyarakat mengenai politik masih dalam pola subject participant atau pelaku peserta, dan peranan mereka sebagai komunikator politik yang otonom masih relatif terbatas.

- b. Partisipasi dengan keterikatan atau *committed participation* dimana masyarakat berkampanye dan mengorganisir diri sendiri karena mereka akan berhasil mengubah keadaan. Komitmen mereka berkaitan dengan tingkat kemampuan yang tinggi (dari upaya bersama tersebut) dan dibuktikan dengan investasi sumber-sumber politik pribadi milik mereka seperti: waktu, dana, kontak-kontak, dan reputasi. Para partisipan dalam tahap ini benar-benar terlibat dalam politik baik secara pribadi maupun psikologis.

Daftar Pustaka:

Afan Gaffar, 2000, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (ed), 1993, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Jakarta: Gramedia.

McQuail, 1987, *Teori Komunikasi Massa ed. 2*, Jakarta: Erlangga.

Sumarmo dan Didi Suhandi, 1993, *Pengantar Studi Komunikasi Politik*, Bandung: Orba Shakti.

Zulkarnaen Nasution, 1990, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, Jakarta: Yudhistira.

Birokrasi bertugas menciptakan suasana agar komunikasi politik, baik secara vertical maupun horizontal, dapat terlaksana secara dewasa, agar ia dapat menjadi pengayom sekaligus sekaligus pelayan masyarakat di kemudian hari (Cosmas Batubara dalam Maswadi Rauf, 1993, *Indonesia dan Komunikasi Politik*).

Struktur tradisional masyarakat Indonesia cenderung patronage dalam bentuk khususnya, yaitu paternalistik (baca Afan Gaffar, 2000, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*).

Almond (1960) meyakini bahwa suatu sistem politik mempunyai tujuh fungsi. Ketujuh fungsi itu adalah sebagai berikut: komunikasi politik; sosialisasi dan rekrutmen politik; artikulasi kepentingan; agregasi kepentingan; pembuatan aturan; aplikasi aturan; pengadilan atas pelaksanaan aturan (*rule adjudication*). Struktur input merupakan infrastruktur politik yang mengkomunikasikan artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan. Sedangkan struktur output merupakan suprastruktur politik yang memproses artikulasi dan agregasi kepentingan dari infrastruktur politik untuk menghasilkan aturan-aturan; pelaksanaan aturan, dsb.

Reese dan Shoemaker (1996) dalam *Mediating the Message*, meyakini bahwa di dalam mencari, mengemas, dan menyajikan berita/opini-nya lembaga pers dipengaruhi beberapa faktor. Yaitu: faktor individual; rutinitas media; organisasi; ekstra media; ideology. Dalam konstek saluran komunikasi politik ini yang dibicarakan hanyalah faktor ekstra media saja.

Diposting oleh ADI PRAKOSA di [01:28 0 komentar](#) 

Selasa, 2008 April 01

PENGELOMPOKAN PROPAGANDA (p&op 3)

Menurut Sifat:

1. White propaganda, merupakan propaganda yang secara jujur, benar, sportif menyampaikan isi (*content*) pesan, serta sumbernya jelas.
2. Black propaganda, merupakan propaganda yang secara licik, palsu, tidak jujur dan menuduh sumber lain melakukan kegiatan tersebut.
3. Grey propaganda, merupakan propaganda yang sumber kurang jelas- tujuannya samar-samar, sehingga menimbulkan keraguan.
4. Ratio propaganda, dengan tujuan rasional.

Menurut Sumber:

1. Concealed, sumber tertutup.
2. Revealed, sumber jelas – terbuka.
3. Deleyed revealed, sumber lambat laun terbuka – jelas.

Menurut Sistem:

1. Menggunakan simbol-simbol, *Symbolic interaction*. Propaganda jenis ini menggunakan lambing-lambang komunikasi yang penuh arti, yaitu:
 - a. bahasa (lisan dan atau tulis;
 - b. gambar-gambar;
 - c. isyarat-isyarat

yang telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat merangsang kiwa komunikasikan untuk menerima pesan dan kemudian memberikan reaksi seperti yang diharapkan oleh komunikator.

2. Menggunakan perbuatan nyata, *propaganda of the deed*. Propaganda jenis ini menggunakan tindakan nyata untuk memaksa komunikasikan menerima pesan dan melakukan tindakan seperti apa yang diharapkan oleh komunikator.

Menurut Metoda Perubahan Sikap:

1. Coercive, propaganda dengan metoda ini hampir mirip dengan *propaganda of the deed*. Namun begitu dalam coercive (bersifat sanksional) ini masih menggunakan lambang-lambang komunikasi yang menimbulkan ketegangan jiwa (takut, seram, jijik). Komunikasikan yang menerima pesan secara coercive, akan melakukan sesuatu sebagai akibat rasa takut, rasa ngeri. Perasaan ini timbul karena ada sanksi-sanksi tertentu yang ditakutinya melalui pesan yang diterimanya. Misal: rasa takut kehilangan pekerjaan atau nafkah, takut terlantar, dikucilkan, sengsara, dll.
2. Persuasive, propaganda jenis ini adalah dengan metoda penyampaian pesan-pesan yang menimbulkan rasa senang, tertarik, rela, dan spontan melakukan sesuatu.

Menurut Wilayah:

1. Regional
2. Nasional
3. Internasional.

Menurut Jenis Kegiatan:

1. Propaganda Dagang
 - a. Iklan
 - b. Peragaan/display
 - c. Pawai
 - d. Pameran
2. Propaganda Politik
 - a. Penyebaran doktrin
 - b. Penyebaran keyakinan politik tertentu.
3. Propaganda Perang
 - a. *Warmongering* atau propaganda yang menghembus-hembuskan perang
 - b. *Defamatory* atau propaganda yang merusak nama baik kepala negara/pemerintah.

- c. *Subversive* yaitu propaganda yang merusak suatu negara dari dalam agar negara tersebut hancur.
- d. *Psy-war* atau *psychological warfare* atau perang urat syaraf. Sering juga disebut *sykewar*.

4. Propaganda budaya

- a. Pameran seni dan budaya
- b. Pementasan seni/tari.
- c. Pertukaran misi-misi kebudayaan
- d. Ilmu pengetahuan.

5. Propaganda Agama

- a. Khotbah
- b. Ceramah agama
- c. Pertemuan agama
- d. Pementasan drama bernafaskan agama

Diposting oleh ADI PRAKOSA di [20:11 0 komentar](#) 

ELEMEN PROPAGANDA (p & op 2)

Propaganda adalah suatu penyebaran pesan yang terlebih dahulu telah direncanakan secara seksama untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat dan tingkah laku dari penerima/komunikasi sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh komunikator (Santosa Sastropetro, *Propaganda: Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa*, Bandung: Alumni, 1991, h. 34).

Santosa Sastropetro menyatakan elemen-elemen atau ciri-ciri propaganda sebagai berikut:

1. Komunikator, atau orang yang dilembagakan/lembaga yang menyampaikan pesan dengan isi dan tujuan tertentu.
2. Komunikasi atau penerima pesan yang diharapkan menerima pesan dan kemudian melakukan sesuatu sesuai pola yang ditentukan oleh komunikator.
3. Kebijakan atau politik propaganda yang menentukan isi dan tujuan yang hendak dicapai.
4. Pesan tertentu yang telah di-*encode* atau dirumuskan sedemikian rupa agar mencapai tujuannya yang efektif.
5. Sarana atau medium yang tepat dan sesuai atau serasi dengan situasi dari komunikasi.
6. Teknik yang seefektif mungkin, yang dapat memberikan pengaruh yang setepatnya dan mampu mendorong komunikasi melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan atau pola yang ditentukan oleh komunikator.

7. Kondisi dan situasi yang memungkinkan dilakukannya kegiatan propaganda yang bersangkutan.

Diposting oleh ADI PRAKOSA di [20:08](#) [0 komentar](#) 

Senin, 2008 Maret 31

7 TEKNIK PROPAGANDA

(disadur dari buku *The Fine Art of Prapaganda*, Alfred McClung Lee & Alizabeth Briant Lee, 1939)

1. Name Calling, teknik memberikan label buruk pada sesuatu gagasan/orang/lembaga supaya sasaran tidak menyukai atau menolaknya.
2. Glittering Generality, teknik menghubungkan sesuatu dengan ‘kata yang baik’ dipakai untuk membuat sasaran menerima dan menyetujui sesuatu tanpa memeriksa bukti-bukti.
3. Transfer, teknik membawa otoritas, dukungan, gengsi dari sesuatu yang dihargai dan disanjung kepada sesuatu yang lain agar sesuatu yang lain itu lebih dapat diterima.
4. Testimoni (kesaksian), teknik memberi kesempatan pada orang-orang yang mengagumi atau membenci untuk mengatakan bahwa sebuah gagasan atau program atau produk atau seseorang itu baik atau buruk.
5. Plain Folks, teknik propaganda yang dipakai pembicara propaganda dalam upaya meyakinkan sasaran bahwa dia dan gagasan-gagasannya adalah bagus karena mereka adalah bagian dari ‘rakyat’.
6. Card Staking, meliputi pemilihan dan pemanfaatan fakta atau kebohongan, ilustrasi atau penyimpangan, dan pernyataan-pernyataan logis atau tidak logis untuk memberikan kasus terbaik atau terburuk pada suatu gagasan, program, orang, atau produk. Teknik ini memilih argument atau bukti yang mendukung sebuah posisi dan mengabaikan hal-hal yang mendukung posisi itu. Argument-argumen yang dipilih bisa benar atau salah.

7. Bandwagon, teknik ini digunakan dalam rangka meyakinkan kepada sasaran bahwa semua anggota suatu kelompok (di mana sasaran menjadi anggotanya) menerima programnya, dan oleh karena itu sasaran harus mengikuti kelompok dan segera menggabungkan diri pada kelompok.

Diposting oleh ADI PRAKOSA di [21:58](#) [0 komentar](#) 

PESAN POLITIK (KP 5)

A. Ragam Pembicaraan Politik

Politisi, professional, atau warga Negara yang aktif, satu hal yang menonjolkannya sebagai komunikator politik adalah mereka berbicara politik. Bagaimana pembicaraan politik itu? David V.J Bell (dalam Nimmo, 1989) meyakini terdapat tiga jenis pembicaraan yang mempunyai kepentingan politik. Yaitu: pembicaraan kekuasaan; pembicaraan pengaruh, dan pembicaraan otoritas.

1. Pembicara kekuasaan merupakan pembicaraan yang mempengaruhi orang lain dengan ancaman atau janji. Bentuknya yang khas adalah "jika anda melakukan X, saya akan melakukan Y." kunci pembicaraan kekuasaan adalah bahwa 'saya' mempunyai kemampuan untuk mendukung janji maupun ancaman (baca kekuasaan koersif).
2. Pembicaraan pengaruh merupakan pembicaraan yang mempengaruhi orang lain dengan nasihat, dorongan, permintaan, dan peringatan. Bentuknya yang khas adalah "jika anda melakukan X, maka akan terjadi Y." Kunci pembicaraan pengaruh adalah bagaimana si pembicara berhasil memanipulasi persepsi atau pengharapan orang lain terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi.
3. Pembicaraan otoritas adalah pemberian perintah. Bentuknya yang khas adalah "lakukan X" atau "Dilarang melakukan X". Yang dianggap sebagai penguasa yang sah adalah suara otoritas dan memiliki hak untuk dipatuhi.

B. Sifat Pembicaraan Politik

1. Kegiatan simbolik: kata-kata dalam pembicaraan politik.

Kegiatan simbolik terdiri atas orang-orang yang menyusun makna dan tanggapan bersama terhadap perwujudan lambang-lambang referensial dan kondensasi dalam bentuk kata-kata, gambar, dan perilaku. Dengan mengatakan bahwa makna dan tanggapan itu berasal dari pengambilan peran bersama, kita meminta perhatian kepada orang untuk memainkan peran. Hal ini berlaku baik bagi lambang politik maupun bagi lambang jenis apapun. Misalnya, orang yang pindah pekerjaan kepada jabatan politik tinggi (presiden, gubernur, anggota DPR, dsb.) akan menggunakan gelar dan kelengkapan kedudukan itu; lambang-lambang itu membantu membentuk kepercayaan, nilai, dan pengharapan sejumlah besar orang mengenai bagaimana mereka harus menanggapi jabatan itu. Dengan merangsang orang untuk memberikan tanggapan dengan cara tertentu, untuk memainkan peran tertentu terhadap pemerintah (komunikator politik), dan untuk mengubah pikiran, perasaan, dan pengharapan mereka, lambang-lambang signifikan memudahkan pembentukan opini publik. Sebagaimana lambang dari pembicaraan politik, kata-kata, gambar, dan tindakan komunikator politik merupakan petunjuk bagi orang-orang bahwa mereka dapat mengharapkan sesama warga negara menanggapi lambang-lambang itu dengan cara tertentu yang sudah dapat diperkirakan.

2. Bahasa: permainan kata dalam pembicaraan politik.

Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang (1) tersusun dari kombinasi lambang-lambang signifikan (tanda dengan makna dan tanggapan bersama bagi orang-orang), di dalamnya (2) signifikansi itu lebih penting daripada situasi langsung tempat bahasa itu digunakan, dan (3) lambang-lambang itu digabungkan menurut aturan-aturan tertentu.

Dalam konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama, ia merupakan instrumen pokok dalam menceritakan realitas. Berger, Peter dan Thomas Luckman (dalam Ibnu Hamad, 2004) meyakini bahwa bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat

narasi. Dalam komunikasi politik penggunaan bahasa menentukan format narasi (dan makna) tertentu. Fiske (1990) dalam *Cultural and Communication Studies*, menambahkan bahwa penggunaan bahasa tertentu dengan demikian berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya. Dari perspektif ini, bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, tetapi bahkan menciptakan realitas.

Atas dasar itu, bahas (pembicaraan politik) bisa didayagunakan untuk kepentingan politik. Dalam kehidupan politik, para elit politik selalu berlomb menguasai wacana politik guna memperoleh dukungan massa. Kaum propagandis biasanya paling peduli dengan pengendalian opini publik.

3. Semiotika: makna dan aturan permainan kata politik.

Pesan-pesan yang dihasilkan dari hasil pengaruh dari para peserta komunikasi banyak bentuknya dan menghasilkan berbagai makna, struktur, dan akibat. Studi tentang keragaman itu merupakan satu segi dari ilmu semiotika, yakni teori umum tentang tanda dan bahasa. Charles Morris (dalam Nimmo, 1989) menyatakan bahwa semiotika membahas keragaman bahasa dari tiga perspektif: semantika (studi tentang makna); sintaktika (berurusan dengan kaidah dan struktur yang menghubungkan tanda-tanda satu sama lain; dan pragmatika (analisis penggunaan dan akibat permainan kata).

4. Pragmatika: penggunaan pembicaraan politik.

- a. Meyakinkan dan membangkitkan massa: pembicaraan politik untuk pencapaian material.
- b. Autoritas sosial: pembicaraan politik untuk peningkatan status.
- c. Ungkapan personal: pembicaraan politik untuk identitas.
- d. Diskusi publik: pembicaraan politik untuk pemberian informasi.

Daftar Pustaka

Dan Nimmo, 1989, *Komunikasi Politik*,

Jhon Fiske, 1990, *Cultural and Communication Studies*,

Ibnu Hamad, 2004, *Kontruksi Realitas Politik dalam Media Massa*,

Nimmo menambahkan satu jenis, yaitu pembicaraan konflik. Maksudnya, melalui pembicaraan, para komunikator politik menyelesaikan perselisihan-perselisihan mereka dengan menyusun perbendaraan kata tentang asumsi, makna, pengharapan dan komitmen bersama.

Diposting oleh ADI PRAKOSA di [19:56 0 komentar](#) 

SISTEM POLITIK DAN SISTEM KOMUNIKASI (SKI 5)

A. Hubungan Sistem Politik dan Sistem Komunikasi

Sistem politik dan komunikasi merupakan dua istilah yang selalu beriringan dan berhubungan satu sama lain. Suatu sistem mengandung unsur-unsur (sub-sistem) yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Pengertian sistem politik seperti yang dikemukakan David Easton (dalam Masfadi Rauf, 1993) adalah seperangkat interaksi yang diabsraksikan dari totalitas kelakuan sosial, dimana nilai-nilai otoritatitatif dialokasikan kepada masyarakat. Sebagai suatu sistem, maka sistem politik terdiri dari subsistem-subsistem yang mempunyai fungsi tertentu. Subsistem-subsistem itu dikenal dengan struktur politik yang terdiri dari infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Untuk berjalannya suatu sistem politik, maka diperlukan suatu mekanisme, dimana setiap struktur politik dapat berhubungan atau berinteraksi dengan struktur politik lainnya berdasarkan fungsi yang melekat pada setiap struktur politik.

Interaksi di antara struktur-struktur politik dalam suatu sistem politik itu dapat dilihat sebagai unsur-unsur dari sistem komunikasi, meskipun tidak selamanya dan tidak semua unsur suatu sistem komunikasi merupakan bagian struktural dari sistem politik. Oleh karena itu setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri. Karenanya sudah barang tentu bahwa setiap negara dengan sistem

politik yang berbeda akan menampilkan pola-pola komunikasi yang berbeda.

Walaupun demikian, bila kita kelompokkan, sistem politik ke dalam dua sifat yaitu sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang tidak demokratis/totaliter, maka akan terlihat dua pola komunikasi yang berbeda.

Pertama, pada sistem politik yang demokratis akan terlihat pola komunikasi politik tatap muka. Oleh Dan Nimmo (1984) disebut dengan pola komunikasi dari *satu kepada satu*. Dalam proses komunikasi tatap muka pembicaraan politik merupakan konsumsi masyarakat sehari-hari, sehingga membentuk partisipasi politik yang tergolong aktif. Tingkah laku komunikasi masyarakat seperti itu tercipta berkat adanya suatu iklim politik yang bebas dan demokratis. Masyarakat dengan bebas dan tanpa rasa takut berbicara tentang kehidupan dan proses politik, didukung oleh keterbukaan informasi melalui media massa.

Pola yang kedua, yaitu pada sistem politik totaliter menampilkan komunikasi politik *satu kepada semua*, di mana pembicaraan politik lebih banyak ditemukan dalam media massa khususnya surat kabar. Itupun sudah merupakan kesempatan yang sangat berarti manakala anggota masyarakat dapat menyampaikan pikiran-pikirannya melalui surat kabar. Secara keseluruhan, pemikiran politik melalui surat kabar tersebut didominasi oleh elite politik yang berkuasa. Dengan kata lain, surat kabar digunakan sebagai alat propaganda politik yang paling penting dalam kehidupan politik. Pembicaraan politik secara tatap muka jarang bahkan tidak ditemui dalam sistem politik jenis ini. Masyarakat tidak dapat melakukan pembicaraan politik, di samping karena ketatnya sistem politik, juga karena derajat kebebasan dan keterbukaan dalam kehidupan politik relatif rendah termasuk di dalamnya kebebasan dan kemandirian media massa, partai politik/kelompok kepentingan. Iklim seperti itu jelas tidak dapat memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan pembicaraan politik secara bebas dan terbuka.

B. Pola Hubungan Pers dengan Sistem Politik

Sistem pers, merupakan bagian atau subsistem dari sistem komunikasi. Sedangkan sistem komunikasi itu sendiri merupakan bagian dari suatu sistem sosial. Oleh karena itu untuk mengetahui sistem pers kita tidak bisa lepas dari bentuk sistem sosial dan bentuk pemerintahan pemerintahan negara yang ada, dimana sistem pers itu berada. John C. Merrill (dalam Rachmadi, 1990) secara lebih tegas menyatakan, bahwa *"a nation's press or media sistem is closely tied to the political sistem"*.

Dari dimensi sejarah pertumbuhan dan perkembangan pers dunia, maka kita mengenal empat macam teori atau konsep dasar tentang pers, yang masing-masing mencerminkan sistem sosial dan sistem politik dimana pers itu berkembang. Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wibur Schramm (1963), dalam *Four Theories of the Press* membedakan teori pers ke dalam: teori pers otoriter, teori pers liberal, teori pers komunis, teori pers tanggungjawab sosial.

1. Teori Pers Otoriter (authorian)

Teori otoriter lahir pada abad kelima belas sampai keenam belas pada masa bentuk pemerintahan bersifat otoriter (kerajaan absolut). Dalam teori ini media massa berfungsi menunjang negara (kerajaan) dan pemerintah dengan kekuasaan untuk memajukan rakyat sebagai tujuan utama. Oleh karena itu pemerintah langsung menguasai dan mengawasi kegiatan media massa. Akibatnya sistem media massa sepenuhnya berada di bawah pengawasan pemerintah. Kebebasan pers sangat bergantung pada kekuasaan raja yang mempunyai kekuasaan mutlak.

Dalam sistem ini manusia adalah bagian dari masyarakat. Manusia baru dapat berarti kalau ia hidup dalam kelompok. Sebagai individu, kegiatannya sangat terbatas. Kelompok lebih penting dari individu. Masyarakat tercermin dalam organisasi-organisasi, dan yang terpenting adalah negara. Negara disebut sebagai tujuan akhir dari proses organisasi masyarakat. Negara adalah pusat segala kegiatan. Pengetahuan dan kebenaran dicapai melalui interaksi individu. Interaksi ini harus terkontrol dan terarah, sehingga kepentingan akhir tidak

dirugikan. Berdasarkan asumsi di atas, teori ini cenderung membentuk satu sistem kontrol yang efektif dan menggunakan media massa sebagai alat penguasa.

Sistem politik Indonesia pada jaman Orde Baru pernah menerapkan teori ini. A Muis (2005) mengatakan negara-negara yang menganut teori pers otorian, seperti Indonesia di zaman Orde Baru, menerapkan pemasangan terhadap kebebasan pers dengan memberlakukan UU no 11 tahun 1966 juncto UU no 21 tahun 1982. Dalam dua undang-undang tersebut, secara tersurat, memberi kewenangan yang sangat signifikan kepada pemerintah untuk mengatur pola-pola komunikasi sistem pers pada waktu itu.

2. Teori Pers Liberal

Sistem pers liberal ini berkembang pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas sebagai akibat timbulnya revolusi industri dan perubahan besar di dalam pemikiran-pemikiran masyarakat di Barat pada waktu itu yang lebih dikenal sebagai abad aufklarung (abad pencerahan).

Menurut teori ini, manusia pada dasarnya mempunyai hak-haknya secara alamiah untuk mengejar dan mengembangkan potensinya apabila diberikan iklim kebebasan menyatakan pendapat. Hal ini tidak mungkin berlaku apabila terdapat kontrol dari pemerintah. Menurut paham liberalisme, manusia pada hakekatnya dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan oleh ratio atau akalnya. Kebahagiaan dan kesejahteraan individu merupakan tujuan dari manusia, masyarakat, dan negara. Manusia sebagai makhluk yang menggunakan akalnya untuk mengatur dunia sekelilingnya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena kemampuan yang dimilikinya ini, maka manusia merupakan unsur utama dari dunia peradaban dan sekaligus sebagai penggeraknya. Kedudukan istimewa yang diberikan kepada individu dalam masyarakat lebertarian ini, mengakibatkan timbulnya anggapan bahwa fungsi dari masyarakat ialah untuk memajukan kepentingan anggota-anggotanya secara individual. Mengenai hakekat kebenaran dan pengetahuan, paham liberal

memandang sebagai tidak berasal dari kelompok kecil orang-orang yang berkuasa atau merupakan monopoli mereka, akan tetapi harus ditemukan sendiri oleh manusia dengan memanfaatkan akalnyanya.

Mengenai kebebasan pers, teori libertarian beranggapan bahwa pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam usahanya mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran, manusia memerlukan kebebasan untuk memperoleh informasi dan pikiran-pikiran yang hanya dapat secara efektif diterima ketika itu, apabila disampaikan melalui pers.

Sistem politik Indonesia, terutama pada tahun 1950 - 1959 dengan berlakunya UUDS, pernah menerapkan teori pers liberal. Peraturan perundangan tentang pers masih mengacu pada KUHP warisan kolonial. Realitas kehidupan pers benar-benar menggambarkan penerapan teori pers liberal. Pers pada masa ini cenderung tidak lagi dipergunakan untuk perjuangan negara, namun dipergunakan sebagai terompet partai. Banyak surat kabar yang beredar merupakan organ dari partai politik pada sistem politik waktu itu (baca Tribuana Said, 1988, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, CV Haji Masagung, Jakarta). Merdeka dan Indonesia Raya merupakan surat kabar yang masih bisa disebut sebagai surat kabar yang netral (memperjuangkan kepentingan bangsa).

3. Teori Pers Komunis

Teori ini berkembang pada awal abad kedua puluh sebagai akibat dari sistem komunis di Uni Soviet. Sistem ini mendasarkan diri pada teori Karl Marx tentang perubahan sosial yang diawali oleh teori dialektika Hegel. Sesuai dengan sejarah kelahirannya dan pertumbuhannya yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah ideologi komunis dan berdirinya negara Uni Soviet, maka teori pers ini lebih sering disebut dengan istilah pers totalitar soviet atau pers komunis soviet.

Dalam teori komunis ini, media massa merupakan alat pemerintah (partai) dan bagian integral dari negara. Ini berarti bahwa media massa harus tunduk pada perintah dan kontrol dari pemerintah atau partai. Tunduknya media massa pada

partai komunis membawa arti yang lebih dalam, yaitu sebagai alat dari partai komunis yang berkuasa. Kritik diijinkan dalam media massa, tetapi kritik terhadap dasar ideologi dilarang. Media massa melakukan apa yang terbaik menurut pemimpin elit negara dan partai, dan apa yang terbaik bagi elit negara dan partai. Yang dilakukan media massa untuk mendukung komunis dan negara sosialis merupakan perbuatan moral, sedangkan perbuatan membahayakan atau merintangi pertumbuhan komunis adalah perbuatan immoral. Fungsi pers komunis ditetapkan sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi massa atau pendidikan massa yang dilancarkan oleh partai. Bimbingan dan pendidikan massa ini dilakukan melalui propaganda dan agitasi yang merupakan salah satu aspek terpenting dari fungsi partai dan kegiatan formal negara.

Tunduknya pers secara total kepada partai komunis ini membawa konsekuensi bahwa kebebasan dibatasi untuk menerbitkan berita-berita atau pandangan-pandangan sendiri, demikian juga usahanya memanfaatkan kebebasan untuk sedapat mungkin melayani kepentingan atau pendapat para pembacanya.

4. Teori Pers Tanggungjawab Sosial

Teori tanggung jawab sosial ini muncul pada permulaan abad kedua puluh sebagai protes terhadap kebebasan yang mutlak dari Teori Libertarian yang mengakibatkan kemerosotan moral pada masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Teori ini merupakan hasil pemikiran para ahli pikir ketika itu yang merasa bahwa teori libertarian murni dan tradisional sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Teori ini sering dianggap sebagai bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya, yang menganggap bahwa tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang. Hal ini ingin ditekankan sebagai orientasi yang utama dari pers. Penekanan tanggung jawab moral kepada masyarakat dengan usaha untuk menghindari kemungkinan terjadinya keadaan yang membahayakan kesejahteraan umum. Teori ini berasal dari sebagian besar laporan "Komisi Hutchins" yang diterbitkan pada tahun 1947. dari laporan

ini dikembangkan pendapat betapa pentingnya peran pers dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, menekankan pada keharusan akan adanya tanggung jawab sosial dari setiap media komunikasi.

Para pemilik media pada teori tanggung jawab sosial yang tidak puas terhadap fungsi pers dalam teori libertarian, berpendapat bahwa pers tidak dapat menjalankan fungsinya secara sempurna. Dalam memberikan pelayanan kepada sistem ekonomi, mereka mengharapkan agar tugas-tugas yang dijalankan oleh pers tidak mendahului fungsi-fungsi pers yang lain, seperti meningkatkan proses demokrasi dan pemberian penerangan kepada masyarakat. Hiburan yang disajikan haruslah hiburan yang baik. Dalam mencukupi keuangan media-media individu tertentu, hendaknya diberikan kebebasan untuk mencari pasar.

Theodore Peterson (dalam Rachmadi, 1990) mengatakan bahwa teori tanggung jawab sosial mendasarkan pada pandangannya kepada suatu prinsip bahwa "kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban, dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern seperti sekarang ini". Uraian Peterson ini mengandung makna bahwa teori ini berorientasi kepada mementingkan kepentingan umum, baik secara individual maupun kelompok. Misalnya pengertian mengenai siapa yang berhak menggunakan media massa, oleh teori tanggung jawab sosial, dianggapnya bahwa bahwa setiap orang mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Dan hak kontrol dari media yang diberikan kepada kelompok-kelompok sebagai pendapat masyarakat, tindakan-tindakan konsumen, dan nilai-nilai profesi.

Sejak sistem politik Indonesia mengundang UU no 40 tahun 1999, secara normatif, kita telah menganut teori pers tanggungjawab sosial. Berbeda dengan UU no 11 tahun 1966 juncto UU no 21 tahun 1982 yang memberi kewenangan pada pemerintah untuk mengontrol sistem pers, UU no 40 tahun 1999 memberi kewenangan kontrol kepada masyarakat. Penanda itu terletak antara lain pada pasal 15 dan 17 UU no 40 tahun 1999 yang berbunyi:

Pasal 15

(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:

- a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
- b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
- c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang-bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 17

(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- d. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.
- e. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Daftar Pustaka

A Muis, 2005, *Gejolak Aspirasi Kebebasan Pers*, Kompas 2 April 2005

Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, 1993, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Gramedia, Jakarta.

F. Rachmadi, 1990, *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, Gramedia, Jakarta.

Dan Nimmo, 1984, *Komunikasi Politik*, Rosdakarya, Bandung.

Tribuana Said, 1988, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, CV Haji Masagung, Jakarta.

Diposting oleh ADI PRAKOSA di [19:53 0 komentar](#)

SALURAN KOMUNIKASI POLITIK (KP 6)

A. Ragam Saluran Komunikasi Politik.

Beberapa bentuk saluran komunikasi politik yang akan diungkapkan disini, dalam fungsi yang berbeda memang telah dikemukakan sebelumnya yakni sebagai komunikator dalam komunikasi politik, oleh karena beberapa unsur tertentu yang dimaksudkan ternyata memang bisa berfungsi ganda. Ia dapat berfungsi sebagai sumber/komunikator di satu saat, tetapi pada waktu tertentu lebih berfungsi sebagai saluran atau media, dan pada waktu yang lain berfungsi sebagai keduanya.

Kegandaan fungsi itu bukanlah sesuatu yang aneh karena suatu pihak dalam berlangsungnya proses komunikasi memang tergantung dari mana kita akan meninjaunya. Birokrasi (pemerintah) misalnya, di satu pihak merupakan komunikator yang menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari pemerintah, namun dalam kesempatan lain ia juga dapat berfungsi sebagai saluran bagi lewatnya informasi yang berasal dari khalayak masyarakat. Fungsi yang ganda itu terutama ditemui pada unsur-unsur yang bersifat organisasional/institusional seperti pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa. Dengan begitu memang kelihatan bahwa dalam prakteknya dapat saja terjadi saling tukar tempat antar unsur-unsur komunikasi tersebut. Pengertian saluran komunikasi politik di dalam pembahasan ini memang luas cakupannya. Segala sesuatu pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik termasuk ke dalam saluran komunikasi

politik. Bahkan yang diistilahkan Almond dan Powell (dalam Nasution, 1990) sebagai struktur-struktur komunikasi pun, sebenarnya dimaksudkan sebagai saluran-saluran komunikasi politik. Struktur-struktur komunikasi politik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Struktur wawanmuka informal. Struktur ini merupakan saluran yang efektif dalam penyampaian pesan-pesan politik. Seterusnya, seperti yang ditemukan pada sistem organisasi manapun, ternyata disamping struktur yang formal dari suatu organisasi/sistem, senantiasa terdapat pula struktur informal yang membayangnya. Saluran ini memang bersifat bebas dalam arti tidak terikat oleh struktur yang formal, namun tidak semua orang dapat akses ke saluran ini dalam kadar yang sama. Mereka yang bisa akses ke saluran informal ini biasanya akan memperoleh lebih banyak informasi ketimbang yang tidak akses, meskipun hal ini masih ditentukan oleh beberapa factor lain.
2. Struktur sosial tradisional. Struktur ini merupakan saluran komunikasi yang memiliki keampuhan-keampuhan tersendiri, karena pada masyarakat yang bersangkutan memang arus komunikasi ditentukan oleh posisi sosial pihak yang berkomunikasi (khalayak maupun sumber). Artinya, pada lapis yang mana yang bersangkutan berkedudukan dan (tentunya akan menentukan pula) akses di susunan sosial masyarakat tersebut. Dalam masyarakat tradisional, susunan struktur sosial yang ada menentukan siapa yang layak berkomunikasi dengan siapa, tentang masalah apa, dan dengan cara apa. Dengan kata lain, struktur sosial tradisional pada hakekatnya mempunyai aturan-aturan yang menentukan baik pola maupun arus komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat tersebut. Bahkan jika diamati lebih jauh, dalam masyarakat yang masih tradisional, sampai-sampai peran komunikasi seseorang

(apakah sebagai komunikator, atau cuma penyampai/saluran, atau hanya berhak menjadi penerima saja) seakan-akan telah ditentukan menurut ketentuan yang berlaku di lingkungan tempat tersebut. Sekalipun harus diakui bahwa penetapan peran tersebut tidak bersifat mutlak, namun karena sifat kehidupan di masyarakat tradisional yang serba preskriptif, maka seolah-olah seorang individu tidak lagi bebas untuk menentukan sendiri peran komunikasi yang diinginkan (atau diperlukan), melainkan harus disesuaikan dengan posisi sosial si individu yang bersangkutan. Secara tidak sadar, sebenarnya sejak masa masyarakat tradisional dulu telah diakui betapa informasi atau lebih luas lagi komunikasi, merupakan sesuatu yang amat dekat dengan kekuasaan. Pye (1963) menggambarkan karakteristik yang mencolok dari proses komunikasi pada masyarakat tradisional, sebagai berikut;

- a. Tidak terorganisir sebagai suatu sistem yang jelas terbedakan dari proses-proses sosial yang lainnya.
- b. Mereka berpartisipasi dalam proses komunikasi tersebut, melakukan atas dasar posisi sosial atau politik yang diduduki oleh yang bersangkutan dalam masyarakatnya, dan sepenuhnya menurut ikatan pribadi mereka.
- c. Informasi biasanya mengalir mengikuti garis hirarkhi sosial atau menurut pola yang telah tertentu berdasarkan hubungan sosial pada tiap komunitas.
- d. Proses komunikasi tersebut tidak independen dari aturan hubungan sosial, ataupun isi komunikasi yang disampaikan. Penyebabnya adalah karena proses komunikasi yang dimaksud umumnya erat berkaitan dengan struktur dasar masyarakat tradisional, maka tindakan mengevaluasi, menginterpretasikan, dan memberi respon terhadap segala aktivitas komunikasi umumnya diwarnai

oleh pertimbangan-pertimbangan yang langsung berhubungan dengan hirarkhi status antara komunikator dan khalayak.

3. Struktur masukan (*input*) politik. Yang dimaksud dengan struktur masukan adalah struktur yang memungkinkan terbentuknya/dihasilkannya input bagi sistem politik yang dimaksud. Struktur-struktur input politik seperti serikat sekerja, kelompok-kelompok kepentingan, dan partai politik, merupakan saluran informasi yang bermakna dalam komunikasi politik. Merupakan sifat paling dasar bagi organisasi-organisasi yang disebut tadi, untuk melakukan transmisi kepentingan, baik yang umum (popular) dan yang khusus, ke arah yang digariskan oleh kepemimpinan politik yang berkuasa. Kehadiran struktur-struktur yang dimaksud ini, menurut mereka –setidak-tidaknya pada sistem yang membolehkan mereka bebas dari kontrol pemerintah- merupakan kesempatan bagi warga negara biasa untuk mempunyai sejumlah besar saluran untuk akses ke elit politik. Dengan akses ke salah satu struktur itu, dan kebebasan untuk membentuk yang baru, bila diperlukan , maka warga negara dengan mudah dapat menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka.
4. Struktur keluaran (*output*) politik. Adalah struktur formal dari pemerintahan. Struktur pemerintahan, khususnya birokrasi, memungkinkan pemimpin-pemimpin politik mengkomunikasikan petunjuk bagi pelaksanaan peraturan-peraturan untuk bermacam pemegang jabatan politik dengan cara yang efisien dan jelas. Efisien, karena jalur pemerintahan tentunya dengan dukungan kewenangan dan wibawa yang dimilikinya dapat dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan secara cepat dan mudah. Jalur birokrasi juga memungkinkan penyampaian pesan-pesan secara jelas karena, terutama karena mereka yang berada dalam jajaran birokrasi secara otomatis telah memiliki bahasa yang kurang lebih sama, yang memungkinkan pengertian-pengertian

menjadi lebih jelas di antara sesama mereka, ketimbang orang-orang yang berada di luar jalur tersebut. Struktur ini juga berperan penting dalam mensuplai informasi dalam jumlah besar kepada publik. Bahkan bukan hanya informasi yang menyangkut aturan resmi seperti peraturan-peraturan, melainkan juga release berita yang dikeluarkan pemerintah, yang nyatanya merupakan sumber informasi penting bagi media massa di banyak masyarakat.

5. Media massa. Saluran media massa, sudah barang tentu, sesuai dengan fungsi aslinya merupakan saluran penting dalam komunikasi politik. Namun dalam membicarakan saluran media massa dalam rangka komunikasi politik, selalu dikaitkan dengan konsep-konsep mengenai:

- a. kebebasan media massa.
- b. Independensi media massa pada suatu masyarakat dari *control* yang berasal dari luar dirinya, seperti pemerintah, pemegang saham, kaum kapitalis/industrialis, partai politik, ataupun kelompok penekan.
- c. Integritas media massa sendiri pada misi yang diembannya.

Ketiga hal tersebut memang membawa konsekuensi yang berbeda dalam pelaksanaan peran media massa sebagai saluran komunikasi politik, sesuai dengan kondisi yang dipunyai oleh masing-masing masyarakat tempat media massa itu berada. Terlepas dari ketiga hal di atas, secara umum media massa mempunyai peranan tertentu dalam menyalurkan pesan-pesan, informasi, dan *political content* di tengah masyarakatnya.

Saluran-saluran lain yang juga berperan dalam penyampaian pesan-pesan politik, diantaranya *lobbying*, media tradisional, demonstrasi, kesenian dan kebudayaan, sastra, media-media khusus seperti telepon, koran dinding, spanduk, brosur, leaflet, rapat umum, gossip, rumor.

Menurut Nasution (1988), yang membedakan suatu sistem politik modern dengan sistem politik tradisional ialah, adanya kebutuhan akan interaksi yang konstan antara lembaga-lembaga politik dengan para pemimpin di satu pihak, dan dengan komponen-komponen sosial yang luas di pihak lain. Perbedaan ini menunjukkan betapa pentingnya saluran-saluran komunikasi dalam perkembangan suatu sistem politik modern. Galnoor (dalam Nasution, 1990) menghubungkan peranan saluran ini dengan kebutuhan suatu sistem politik akan dukungan politik yang hanya bisa diperoleh jika jaringan komunikasi berhasil menembus hingga kebagian-bagian masyarakat yang relevan dengan politik. Ia mengartikan penerobosan (penetrasi) saluran tersebut sebagai suatu kemampuan untuk melintasi atau menembus batas-batas geografis dan sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat. Karena itu pula, atribut-atribut yang biasanya bersifat unik untuk tiap-tiap masyarakat akan menentukan jenis saluran penerobosan yang mana dipakai untuk menembus bagian-bagian tertentu masyarakat yang dimaksud. Mao dan Gandhi misalnya, disebut telah menggunakan saluran kepemimpinan garis massa untuk dapat menjangkau seluruh bangsa Cina dan India yang tersebar luas itu.

B. Saluran Media Massa dalam Komunikasi Politik.

Dengan suatu sistem komunikasi yang otonom, maka komunikasi yang bersifat tertutup (covert) pada birokrasi, kelompok-kelompok kepentingan, dan partai politik, sampai tingkat tertentu dapat diatur dan dikendalikan dengan publisitas. Pada saat yang sama, kepentingan-kepentingan yang laten (tidak dinyatakan secara terang-terangan) di tengah masyarakat dapat dibuat menjadi ekspilisit melalui media komunikasi yang netral.

Otonomi media komunikasi memungkinkan suatu arus informasi yang bebas dari masyarakat ke pemerintahan, dan di dalam pemerintahan sendiri, serta dari suatu struktur politik ke

struktur politik yang lain. Hal itu juga memungkinkan adanya suatu umpan balik yang terbuka dari output sistem politik ke input sistem politik kembali.

Pada sebagian masyarakat transisional para pemimpin politik memandang pembangunan media massa modern sebagai sesuatu kekuatan untuk menegakkan persatuan nasional, sekaligus sebagai daya untuk mengerakkan modernisasi. Dengan menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi dalam hal bahasa, perbedaan tingkat pengetahuan, kepercayaan, dan kebiasaan, maka perluasan komunikasi berfungsi sebagai jembatan bagi sistem-sistem yang tadinya dicirikan oleh arus komunikasi yang amat heterogen.

Masalah membangun identitas nasional memang merupakan suatu persoalan yang kompleks. Disamping kekuatan positif media massa nasional, pengembangan suatu kultur politik yang stabil dan homogen akan tergantung dalam banyak hal kepada arah yang dikembangkan oleh struktur komunikasi yang ikut serta dari kalangan partai, kelompok kepentingan, dan para pemimpin opini, yang berhubungan dengan warga masyarakat secara lebih langsung.

Sebagian informasi, khususnya yang disampaikan oleh media massa akan melintasi garis-garis batas geografis dan kelas sosial. Namun dua karakteristik perubahan *attitude* akan membatasi dampak media tersebut. *Yang pertama* adalah interpretasi informasi melalui media massa tentunya akan dilakukan oleh para pemimpin opini. Pemimpin opini itu sendiri akan amat dipengaruhi oleh hubungan antar personanya (jaringan sosialnya), yang menurut penelitian selama ini menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa pengaruhnya lebih kuat dalam hal persuasi ketimbang media massa.

Yang kedua, sekalipun secara persis masih diperdebatkan, tapi dalam banyak hal media massa diakui sebagai saluran yang berkemampuan untuk menyampaikan lebih dari sekedar

informasi politik. Artinya, media massa dapat dibuktikan mempunyai efek politik dalam suatu kelangsungan sistem politik suatu masyarakat. Kekuatan media, dalam kaitan ini, menurut Gurevitch dan Blumler (dalam Nasution, 1990) bersumber dalam tiga hal, yaitu struktural, psikologis, dan bersifat normatif. Akar struktural kekuatan media massa bersumber pada kemampuannya yang unik untuk menyediakan khalayak bagi para politisi yang ukuran dan komposisinya tidak akan diperoleh para politisi dimaksud melalui alat yang lain. Sedangkan akar psikologis dari kekuatan media bersumber pada hubungan kepercayaan dan keyakinan yang berhasil diperoleh (meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda) oleh organisasi media dari anggota khalayaknya masing-masing. Ikatan saling percaya ini tumbuh berdasarkan pada pemenuhan harapan khalayak selama ini dan validasi dari hubungan percaya mempercayai di masa lampau antara media yang bersangkutan dengan khalayaknya. Kombinasi antara akar struktural dan akar psikologis tadi memungkinkan media mendudukkan diri di tengah-tengah –antara politisi dan khalayak- dan sekaligus mencampuri proses politik yang berlangsung. Campur tangan tersebut mungkin saja tidak disukai oleh banyak pihak termasuk kalangan politik dimaksud. Di sini kemudian, tampillah sifat normatif media yang bersumber pada prinsip-prinsip demokrasi mengenai kebebasan menyatakan pendapat, kebutuhan akan perlindungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan kekuatan politik, yang memberi legitimasi kepada peran independensi media dari kendali politik (baca handsout komunikasi massa: teori-teori normatif komunikasi massa).

Media massa dianggap memiliki peranan yang unik dalam pembangunan politik, karena memiliki suatu instrumen teknologi yang independen, yang produknya dapat menjangkau ke tengah-tengah masyarakat dalam jumlah yang besar (Gerbner dalam McQail, 1987). Di samping itu, media massa menganggap diri sebagai perantara yang independen antara pemerintah dengan publik.

C. Pemanfaatan Saluran-Saluran Komunikasi Politik

Berfungsinya saluran-saluran komunikasi politik dalam suatu sistem politik tergantung pula bagaimana pemanfaatan saluran-saluran tersebut oleh masyarakat, dan apakah masyarakat dapat akses sepenuhnya ke saluran-saluran tersebut. Galnoor (dalam Nasution, 1990) menekankan masalah pemanfaatan saluran ini karena menurut pendapatnya mobilitas politik dan masalah akses ke jaringan komunikasi merupakan prasyarat bagi tumbuhnya partisipasi politik. Ia mengartikan partisipasi politik sebagai aktivitas pribadi warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengemudian yang aktual dari sistem politik yang bersangkutan.

Suatu partisipasi politik dalam kaitannya dengan komunikasi politik, menurut Galnoor (dalam Nasution, 1990), mencakup hal-hal berikut:

1. Kemampuan memprakarsai suatu pesan informasi oleh para individu yang menginginkan sesuatu dari sistem politik, atau memberikan respon terhadap sesuatu yang akan atau telah dilaksanakan. Dengan perkataan lain, suatu usaha untuk menggunakan jaringan komunikasi dan saluran-salurannya untuk tujuan yang disebut di atas.
2. Pemanfaatan secara otonom jaringan komunikasi politik yang ada, dalam pengertian bukan sekedar hasil mobilisasi dari atas.
3. Upaya informasional yang bukan sekedar suatu praktek berkomunikasi, tetapi benar-benar sebagai suatu upaya untuk memperoleh dampak –yakni menyampaikan pesan-pesan kekuasaan untuk mempengaruhi kemudi sistem politik yang bersangkutan.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa pemanfaatan saluran komunikasi politik tersebut berhubungan dengan dua tahap perkembangan politik yang demokratis, yaitu:

- a. Partisipasi responsif, dimana anggota masyarakat memberikan suara, menyampaikan keluhan, kepada para pejabat, dan barangkali mengidentifikasi diri mereka melalui tanda-tanda identitas tertentu. Namun dalam tahap ini, konsepsi masyarakat mengenai politik masih dalam pola subject participant atau pelaku peserta, dan peranan mereka sebagai komunikator politik yang otonom masih relatif terbatas.

- b. Partisipasi dengan keterikatan atau *committed participation* dimana masyarakat berkampanye dan mengorganisir diri sendiri karena mereka akan berhasil mengubah keadaan. Komitmen mereka berkaitan dengan tingkat kemampuan yang tinggi (dari upaya bersama tersebut) dan dibuktikan dengan investasi sumber-sumber politik pribadi milik mereka seperti: waktu, dana, kontak-kontak, dan reputasi. Para partisipan dalam tahap ini benar-benar terlibat dalam politik baik secara pribadi maupun psikologis.

Daftar Pustaka:

Afan Gaffar, 2000, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (ed), 1993, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Jakarta: Gramedia.

McQuail, 1987, *Teori Komunikasi Massa ed. 2*, Jakarta: Erlangga.

Sumarmo dan Didi Suhandi, 1993, *Pengantar Studi Komunikasi Politik*, Bandung: Orba Shakti.

Zulkarnaen Nasution, 1990, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, Jakarta: Yudhistira.

Birokrasi bertugas menciptakan suasana agar komunikasi politik, baik secara vertical maupun horizontal, dapat terlaksana secara dewasa, agar ia dapat menjadi pengayom sekaligus sekaligus pelayan masyarakat di kemudian hari (Cosmas Batubara dalam Maswadi Rauf, 1993, *Indonesia dan Komunikasi Politik*).

Struktur tradisional masyarakat Indonesia cenderung patronage dalam bentuk khususnya, yaitu paternalistik (baca Afan Gaffar, 2000, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*).

Almond (1960) meyakini bahwa suatu sistem politik mempunyai tujuh fungsi. Ketujuh fungsi itu adalah sebagai berikut: komunikasi politik; sosialisasi dan rekrutmen politik; artikulasi kepentingan; agregasi kepentingan; pembuatan aturan; aplikasi aturan; pengadilan atas pelaksanaan aturan (*rule adjudication*). Struktur input merupakan infrastruktur politik yang mengkomunikasikan artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan. Sedangkan struktur output merupakan suprastruktur politik yang memproses artikulasi dan agregasi kepentingan dari infrastruktur politik untuk menghasilkan aturan-aturan; pelaksanaan aturan, dsb.

Reese dan Shoemaker (1996) dalam *Mediating the Message*, meyakini bahwa di dalam mencari, mengemas, dan menyajikan berita/opini-nya lembaga pers dipengaruhi beberapa faktor. Yaitu: faktor individual; rutinitas media; organisasi; ekstra media; ideology. Dalam konstek saluran komunikasi politik ini yang dibicarakan hanyalah faktor ekstra media saja.

Diposting oleh ADI PRAKOSA di [01:28](#)

